

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO. 1100/PDT.G/
2017PA.PBR TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memeperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



OLEH

ANGGITA KURNIA

11621200521

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAUP-PEKANBARU
1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017PA.Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan”** yang ditulis oleh :

Nama : **ANGGITA KURNIA**
 NIM : **11621200521**
 Program Studi : **Hukum Keluarga (AH)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Mei 2020

Pembimbing Skripsi:

Dr. Johari, M.Ag.
NIP. 19460320199102 1 001

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO. 1100/Pdt.G/2017PA.Pbr
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

Nama Penulis : ANGGITA KURNIA
NIM : 11621200521
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 19 Mei 2020
Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru,
Tim Penguji

2020



1. Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Ahmad Fauzi, SHI, MA
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. A. Akmal Abdul Munir, Lc MA
(Anggota Penguji)
4. Ade Fariz Fakhruallah, M. Ag.
(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diinstitusi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggita kurnia
 Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 17 Desember 1998
 Nim : 11621200521
 Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 15 Juni 2020

Yang menyatakan,


Anggita Kurnia
 NIM. 11621204294

UIN SUSKA RIAU

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zals	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Ye dan es
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Mim
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اَوْ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ

: *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan harakat	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ اُ	<i>Fattah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dengan garis diatas
وُ	<i>Dammah</i> dan ya	ū	u dengan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>	قِيلَ	: <i>qīla</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>	يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk Ta Marbūṭah ada dua yaitu Ta Marbūṭah yang hidup dan mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata terakhir dengan Ta Marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta Marbūṭah itu di transliterasikan dengan [h].

Contoh:

هَوَلْ	: <i>hauḷa</i>
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-faḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi undang-undang

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
لَحَقُّ	: <i>al-ḥaqqū</i>
نِيِّمًا	: <i>ni''ima</i>
أَدُوْءٌ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh :

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sandang kata ini transliterasi pedoman dalam ال (lam dan alif). Huruf ditransliterasi sesuai dengan bunyinya baik dikuti oleh huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contoh:

الْأَسْمَاءُ	: <i>asy-syamsu</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>az-zalzalāh</i>
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai aturan tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital misalnya digunakan pada awal nama orang, tempat atau bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru ramadān al-lazi unzila fihi al-Qur’ān

Naṣir al-Din al-Ṭusi

Al-gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

9. Penulisan Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Seperti kata al-Qur’ān, Sunah, khusus dan umum. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Anggita Kurnia, (11621200521): “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt. G/2017/PA. Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan.

Sudah menjadi kodrat Tuhan bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Dalam melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat maupun rukun di dalam perkawinan. Syarat maupun rukun perkawinan yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan perkawinannya batal atau dibatalkan.

Perkawinan merupakan bentuk perikatan jangka panjang yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak terikat, maka seharusnya lebih diperhatikan syarat-syarat maupun rukun perkawinan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi apa yang tidak di inginkan, sebagaimana dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 1100/Pdt. G/2017/PA, tentang pembatalan perkawinan, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembatalan perkawinan ini penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A. 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama pekanbaru klas 1 A dan 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A No. 1100/Pdt. G/2017/PA. Pbr.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang di lakukan di perpustakaan (*library reseach*). Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji Putusan hakim No. 1100/Pdt. G/2017/PA. Pbr. dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A dalam perkara No. 1100/Pdt. G/2017/PA. Pbr. tentang pembatalan perkawinan, karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan, berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71 (a). dan jika ditinjau berdasarkan hukum islam putusan ini sangat berkaitan dengan kemaslahatan dalam bernegara di Indonesia.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Hukum Islam.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam* yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia dan berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya hingga saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Kurniadi dan Ibunda Nursima yang selalu memberikan doa, dorongan, dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Adik-adikku Nia Sukma Gita, Wilda Lativa, dan Nauvalyn Zaskia yang selalu memberikan semangat ketika penulis merasa jenuh dalam menulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor 1,2, dan 3 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. Heri Sunandar M. Lc, selaku wakil dekan 1, bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan Akademik selama proses perkuliahan penulis.
 5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
 6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag, selaku Panasehat Akademik sekaligus pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan dan selalu memberikan motivasi serta kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis.
 7. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk kawan-kawan jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah angkatan 2016, terkhusus kepada Cholis Shotul Malikah, Roslina Harahap, Miftahul Jannah, dan Radhiyah yang telah memberikan banyak bantuan baik materi maupun non materi selama menempuh pendidikan Stara 1 di UIN SUSKA RIAU baik suka maupun duka.

Pekanbaru, 08 April 2020

Penulis,

ANGGITA KURNIA
NIM: 11621200521

DAFTAR ISI

PERSetujuan

PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

PEDOMAN TRANSLITERASI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dana Kegunaan Penelitian.....	8
E. Studi Review Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN

AGAMA DAN HAKIM

A. Kewenangan Pengadilan Agama.....	15
B. Kewenangan Hakim	24
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	26
D. Syarat-syarat Menjadi Hakim	32
E. Hakim dalam Islam	33

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan.....	34
B. Poligami	47
C. Pembatalan Perkawinan	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr.....	65
--------------------------------------------------------------------------	----

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara No. 1100/Pdt.G/2017/PA/Pbr.....	67
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA/Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan merupakan suatu yang sacral yang begitu melembaga bagi Negara Indonesia yang pluralis baik dari segi budaya, adat maupun agama. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keetuhanan Yang Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut.² Disamping definisi yang diberikan oleh UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizan* merupakan ungkapan dari penjelasan “ikatan lahir

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet. Ke-1, hlm. 7

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), cet. Ke-1, hlm. 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.³

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asasa monogamy). Pada realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja. Dalam Islam memiliki istri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang laki-laki menikahi perempuan adalah sebanyak empat orang dan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, menyangkut masalah lahiriyah dan batiniyah. Dan harus melalui izin pengadilan.⁴

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam mendapatkan izin dari pengadilan agama adalah :

1. Adanya alasan untuk berpoligami:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Adanya persetujuan istri.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-3, hlm. 40

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), cet. Ke-1, hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
4. Adanya jaminan bahwa suami akan atau mampu berlaku adil diantara istri-istrinya.⁵

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebuah perkawinan yang akan berlangsung atau yang telah berlangsung dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini adalah UUP. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 UUP dimana disebutkan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan Pasal 22 UUP tersebut diatas maka dapat dikatakan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang hukum perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Agama bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.⁶

Di dalam ketentuan Pasal 23 UUP dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1).

⁶ Wahyono Darmabrahta dan Surini Ahlan Sjahrif, *Hukum Perkawinan dan Kelaurga di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), cet. Ke-2, hlm.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 6 ayat (2) UUP dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁷

Pada kenyataannya praktik poligami yang terjadi di masyarakat, banyak dilakukan secara menyimpang, seperti suami melakukan poligami pada saat keadaan istri terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya dengan baik sebagai istri. Praktek poligami tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan dari pengadilan dan istri. Dalam prakteknya seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan yang berlaku dalam perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan itu berakhir.⁸ Akibat dari perkawinan poligami diatas karena kurangnya syarat serta rukun dalam perkawinan dapat menyebabkan batalnya perkawinan.

Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang telah terkait perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari Pengadilan. Dengan demikian poligami yang akan dilakukan tanpa izin dari Pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak

⁷ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 23

⁸ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), cet. Ke-2, hlm.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi.⁹

Meskipun pada prinsipnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berasaskan monogamy, akan tetapi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No.1 Tahun 1991) sebenarnya menganut kebolehan Poligami walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri saja. Kebolehan berpoligami tersebut memang tidaklah terlepas dari berbagai persyaratan. Persyaratan-persyaratan seseorang dapat berpoligami yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memanglah sangat berat, sehingga menyebabkan orang-orang sering kali mengambil jalan pintas dengan melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Banyak cara yang dilakukan seseorang agar dapat berpoligami, salah satunya yaitu dengan cara memalsukan identitas dirinya.

Apabila persyaratan-persyaratan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang baru dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri, ditempat suami atau istri. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 24) yaitu bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa izin dan

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-3, hlm. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sepengetahuan pihak lainnya. Pemikiran tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) “bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71).¹⁰ Alasan tersebut dapat menjadikan sebuah landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum yang berupa permohonan pembatalan perkawinan oleh istri yang mengetahui suami nya telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan izin darinya pada Pengadilan Agama yang berwenang.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan Pengadilan yang diwajibkan mealui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.¹¹

Di Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat sebuah kasus tentang pembatalan perkawinan poligami, yaitu terdapat dalam putusan No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr, dimana seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama maupun izin pengadilan. Dalam perkara ini pemohon pembatalan perkawinan yaitu istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan untuk membatalkan perkawinan suami (termohon 1) dengan istri

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Reneka Cipta 1991 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI 1999, hlm. 40

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. Ke-1, hlm. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kedua (termohon 2) yang tercatat di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Riau. Identitas suami (termohon 1) yang tercatat di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Riau adalah data palsu, di data tersebut suami (termohon 1) mengaku masih bujangan sedangkan sebelumnya sudah pernah menikah dan telah memiliki dua orang anak terbukti dengan adanya akta nikah.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya perkara pembatalan perkawinan poligami karena suami tidak izin dan memalsukan identitas penulis menganggap menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana perspektif hukum Islam dan maqashid syari'ah dari pembatalan perkawinan yang ditetapkan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017PA.Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini pada Putusan perkara Pembatalan Perkawinan No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan masalah diatas dan untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, maka rincian rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang pembatalan perkawinan ?

D. Tujuan Dana Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan antara lain :

- a. Sebagai penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan .
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Studi Review Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Judul/ Tahun	Substansi	Pembeda
1.	Atia Fani Rifqoh/ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat hukumnya (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.Y K) Fakultas Syariah dan Hukum 2013.	Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Yogyakarta.	Dalam skripsi ini yang penulis bahas lebih mengarah kepada tinjauan mashlahah terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap pembatalan perkawinan No. 1100/Pdt.G/2017/PA.P br
2.	Arud Badrudin/ Pembatalan perkawinan karena poligami liar (Analisa Yurisprudensi Perkara No. 416/Pdt.G/1995/PA.S umedang) Fakultas Syariah dan Hukum 2010.	Skripsi ini menjelaskan tentang argumentasi hakim dalam menetapkan hukum pembatalan perkawinan akibat poligami liar serta mengetahui pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan dalam pembatalan perkawinan.	Dalam skripsi ini yang penulis bahas lebih mengarah kepada pembatalan perkawinan akibat tidak izin dari istri pertama dan izin pengadilan dan bagaimana tinjauan mashlahah dari pembatalan perkawinan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau system untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normative, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder saja.¹³

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penggugat, tergugat dan hakim yang memutuskan perkara. Sedangkan objek yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr

3. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka data primer tidak dipakai, yang dipakai adalah data sekunder. Yang mana data sekunder diperoleh dari:

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-5, hlm. 3

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. Ke-6, hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada kajian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum. Diantaranya adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili dan kitab-kitab fiqih lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal-jurnal yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data dari buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data-data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan redaksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan pokok bahasan.

6. Metode Penulisan Data

Untuk mengolah data dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode :

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.¹⁴
- b. Metode Induktif adalah mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.
- c. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

¹⁴ Burhan Bangin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-2, hlm. 108

7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih serta memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan, begitu pula dengan sub-sub bab nya.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang Pengadilan Agama dan Hakim

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kewenangan Pengadilan Agama, kewenangan Hakim, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, syarat menjadi Hakim dan Hakim dalam Islam.

BAB III : Tinjauan Teoritis

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan teoritis tentang pernikahan, poligami dan pembatalan perkawinan yang meliputi tentang pengertian, sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan menurut perspektif hukum fiqih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini penulis akan membahas hasil penelitian penulis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam terhadap perkara pembatalan perkawinan No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM

A. Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu. Pengertian Peradilan Agama ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama pasal 2. Jelas bahwa peradilan Agama disini mengurus perkara-perkara masyarakat muslim dengan berdasar Undang-Undang yang berlaku dan syaria Islam.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam kekuasaan kehakimannya. Serta Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya, dan merupakan Pengadilan Tingkat Banding.¹⁵

Dalam setiap peradilan memiliki kekuasaan dan kewenangannya sendiri, termasuk pula peradilan agama yang pada hakikatnya peradilan khusus bagi orang-orang Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu. Dimana perkara-perkara tertentu tersebut masuk ke dalam kewenangan pada peradilan agama. Yang dimaksud dengan kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama disini adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan

¹⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi

perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Kewenangan tersebut adalah kewenangan relatif dan kewenangan absolut yang merupakan kewenangan wilayah hukum antar pengadilan agama serta kewenangan jenis perkara.¹⁶

1. Kewenangan relatif

Yang dimaksud dengan kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁷

a. Kewenangan relatif perkara gugatan

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi.¹⁸

- 1) Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediaman nya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55

¹⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acaa di Peradilan Agama*, (Bandung: Mnadar Maju, 2018), hlm. 33

¹⁸ *Ibid*. hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tempat tinggal penggugat.
- 3) Apabila tempat tinggal kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- 4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- 5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.
- b. Kewenangan relatif perkara permohonan

Dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam UU No 7 Tahun 1989, sebagai berikut:¹⁹

 - 1) Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. (*Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*).
 - 2) Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang

¹⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. (*Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*).

- 3) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan (*Pasal 17 ayat 91) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*).
- 4) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. (*Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*).
- c. Pengecualian kewenangan relatif terhadap perkara gugatan

Kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian, sebagai berikut.²⁰

- 1) Permohonan cerai talak

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan diatur dalam Pasal 66 ayat (22) UU No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

- a) Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon.

²⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Suami/pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon apabila istri secara sengaja meninggalkan tempat tinggal kediaman tanpa izin suami.
- c) Apabila istri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon.
- d) Apabila keduanya (suami istri) bertempat tinggal di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Kewenangan Absolut

Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melakukan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan Agama itulah yang disebut dengan kompetensi absolut atau kewenangan absolut atau kekuasaan absolut. Kewenangan absolut (*absolute cometentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan

²¹ Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi", *Yudisia*, Vol.7, Desember 2016, hlm. 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.²²

Dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memustuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yuridiksi antara Pengadilan Agama.²³

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari seorang [Pasal 3 ayat (2)];

²² Abdullah Tri Wahyudi, *Op. cit.* hlm. 91

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), Cet. ke-8, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- c. Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- d. Pencegahan perkawinan [Pasal 7 ayat (1)];
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN [Pasal 21 ayat (30)];
- f. Pembatalan perkawinan [Pasal 22];
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri [Pasal 34 ayat (3)];
- h. Perceraian karena talak (Pasal 39);
- i. Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
- k. Mengenai penguasaan anak-anak (Pasal 47);
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (Pasal 41 sub b);
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 sub c);
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (1)];
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- p. Penunjukkan kekuasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];
- q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebeanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya (Pasal 54);
- t. Penetapan asal-usul anak [Pasal ayat (2)] dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)];
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).²⁵

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

²⁵ *Ibid*, hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini dijelaskan bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, yang selama ini berbeda satu sama lain karena dasar hukumnya berbeda. Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang Bergama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.²⁶

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang Ekonomi Syariah meliputi sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksa dana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;

²⁶ *Ibid*, hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan;
- k. Bsinis syariah.²⁷

Mengenai perkara Ekonomi Syariah ini merupakan Revisi Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i) Revisi UUPA menyatakan bahwa PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.²⁸

B. Kewenangan Hakim

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

²⁷ *Ibid*, hlm. 16

²⁸ Rifyal Ka’bah, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai sebuah Kewenangan Badan Peradilan Agama”, *Al-Mawardi*, Edisi XVII Tahun 2007, hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁹

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalalam kewenanangnya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara

²⁹ Immanuel Christophel liwe, *kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan*, Lex Crimen Vol.III No.1, hlm.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.³⁰ Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern.

Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).³¹

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 135

³¹ *Ibid*, hlm.136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³²

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

³². Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Penegak, 2004), Cet. ke-5, hlm.140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³³

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.³⁴

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

³³. *Ibid*, hlm.142

³⁴. Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum “mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat “Konsep-konsep keadilan yang telah baku” Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.³⁵

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), benar secara moral (righteous). Dari perincian tersebut ternyata bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan oleh Hakim, maka Hakim selalu berlindung kepada Upaya Hukum yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, artinya apabila Hakim Tingkat Pertama mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding untuk diuji

³⁵ Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung:Angkasa,1980), hlm.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai pengujian di Peninjauan Kembali, oleh karena itu diperlukan norma hukum sebagai standard bagi para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.³⁶

Terdapat 6 (enam) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia sebagaimana tercantum dalam *The Bangalore Principle*, yakni:³⁷

1. Independensi

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

2. Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.

3. Integritas

Integritas Hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 12

³⁷ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang:Setara Press, 2015) hlm.141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepantasan dan kesopanan

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan.

5. Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa.

6. Kecakapan dan keseksamaan

Kecakapan dan keseksamaan Hakim merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional Hakim.³⁸

³⁸*Ibid*, hlm. 142

D. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Di Indonesia untuk dapat diangkat menjadi hakim di Pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan Agama ini ada beberapa syarat yang diatur pada beberapa undang-undang yaitu: menurut UU Nomor 7 Tahun 1989, kemudian UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Pertama UU Nomor 7 Tahun 1989, dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989.

Syarat menjadi Hakim PA (Pasal 13 ayat (1) bab II UU No. 50 Tahun 2009)³⁹

1. Warga Negara Indonesia
2. Bergama Islam
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia kepada Pancasila dan UUD Negara RI 1945
5. Sarjana Syariah, sarjana Hukum Islam atau sarjana Hukum yang mengetahui Hukum Islam
6. Lulus Pendidikan Hakim
7. Mampus secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
8. Berwibawa, jujur, adil dan tidak berkelakuan tercela
9. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun

³⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Op. cit*, hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Hakim dalam Islam

Adapun salah satu adab sebagai seorang hakim dalam islam adalah mampu bersikap adil. Al-Qur'an memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan keadilan daripada keadilan.⁴⁰ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁴⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas 1995), hlm. 72

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Al-Huda: Depok, 2002), hlm. 108

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dlaam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁴²

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta untuk membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata "*inkah*" atau "*tazwij*". Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dirtulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut:

⁴² H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.⁴³

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bab 1 Pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁴ Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Quran

QS. Ar-Rum ayat 21:⁴⁶

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁴³ Ibid, hlm. 8

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019), Cet. ke-11, hlm. 11

⁴⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Op.cit*, hlm. 407

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum:21)

QS. An-Nur ayat 32:⁴⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.”(QS. An-Nur:32).

QS. An-Nahl ayat 72:⁴⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.” (QS. An-Nahl:72)

⁴⁷ Ibid, hlm. 355

⁴⁸ Ibid, hlm. 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadist

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمَنَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بَكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Artinya: *Dari Alqamah, dia berkata: Aku berada bersama Abdullah, lalu beliau ditemui Ustman di Mina dan beliau berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu. "Maka keduanya pun menyingkir ke tempat sepi. Ustman berkata, "Apakah engkau mau wahai Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu?" Ketika Abdullah melihat taka da kebutuhannya terhadap hal ini maka beliau mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, "Wahai Alaqamah." Aku sampai padanya dan dia berkata, "Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu; benar-benar kami pernah bersama Nabi SAW dan saat itu kami masih muda, kami tidak memiliki sesuatu. Maka Nabi SAW bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang memiliki kesanggupan untuk menikah, maka hendakny ia menikah. [Maka sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji] Dan siapa yang tidak sanggup maka hendakny ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng"(HR. Bukhari).⁴⁹*

3. Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Penerjemah: Raminatullah, Fudhail Rahman, Masrur Huda, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), Cet. ke-1, hlm. 751

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.⁵⁰

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

⁵⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.”⁵¹

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat taklif perintah (*thalabul fi'li*), taklif takhyir, dan taklif larangan (*thalabul kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan atau mencium wanita yang bukan mahram, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalanya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut keadaan.⁵²

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah

⁵¹ *Ibid*, hlm. 10

⁵² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁵³

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan

⁵³ Ibid, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

takbiratul ihram untuk shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.⁵⁴

“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan “Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:⁵⁵

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁵⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

a). Syarat-syarat Suami:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri,

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit*, hlm. 45

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 46

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.⁵⁷

b). Syarat-syarat Istri:

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya, dan
4. Sedang tidak berihram.

c). Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil, dan
6. Tidak sedang ihram.

d). Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;

⁵⁷ .M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.⁵⁸

e). Syarat-syarat Ijab dan Kabul:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵⁹

Rukum dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan

⁵⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit*, hlm. 13

⁵⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah”.⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan Kabul.⁶¹

Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:⁶²

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam dapat keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), cet. ke-1, hlm. 56

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm. 18

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

9. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan dari diisyaratkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:⁶³

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat QS. An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada tuhanmu yang menjadikan diri kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.”

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia hawa nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. ke-1, hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan dalam ketenangan hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁶⁴

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

Rahmat hakim memaparkan bahwa hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Menyambung silaturahmi
2. Mengendalikan nafsu yang liar
3. Menghindari diri dari perzinaan
4. Estafeta amal manusia
5. Estetika kehidupan
6. Mengisi dan menyemarakkan dunia
7. Menjaga kemurnian nasab.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmat hakim menegaskan bahwa pernikahan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan estafeta pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melakukan salah satu *maqashid syariah*, yaitu memelihara keturunan atau *hifzh al-nasl*, dan memelihara keturunan yang legal dan formal harus dimulai dengan cara memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat tujuan Islam tersebut, generasi yang dilahirkan adalah generasi *rabbani*.⁶⁵

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata-kata “Poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminology, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.⁶⁶

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), Cet. ke-6, hlm. 133-145

⁶⁶ Abdul Mujieb, M, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. ke-1, hlm. 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus berarti banyak dan gune berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan Andros berarti laki-laki.

Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meski demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Yang dimaksud dengan poligini itu menurut masyarakat umum adalah poligami.⁶⁷

2. Poligami dalam UU Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)

a. UU Perkawinan Menganut Asas Monogami

Pada prinsipnya dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menganut asas monogamy seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan, *seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*. Namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di

⁶⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Op.cit*, hlm. 351

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.⁶⁸

b. Alasan Poligami

Alasan-alasan kebolehan poligami terdapat dalam Pasal 4 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁹

Alasan poligami tersebut diatas juga diatur dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 57. Berkenaan dengan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijelaskan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri

⁶⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. ke-1, hlm. 94

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019), Cet. ke-11, hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan.⁷⁰

Berdasarkan pasal diatas, UU Perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelas bahwa asas yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogamy mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogamy yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetap atas dasar izin dari hakim (pengadilan).⁷¹

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁷²

c. Syarat-Syarat Poligami

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

⁷⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kebecana, 2004), cet. ke-, hlm. 163

⁷¹ Mardani, *Op.cit*, hlm. 96

⁷² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁷³

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternative yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁷⁴

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019), Cet. ke-11, hlm. 35

⁷⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit*, hlm.164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah syarat-syarat diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.

d. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut ketentuan PP No.9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.
2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
 - a. Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
 - c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
3. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
4. Pegawai pencatat dilarang untuk melaksanakan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.⁷⁵

C. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqih

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu, dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.”

Batalnya perkawinan dalam fiqih disebut dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud dengan memfasakh akad adalah memutuskan atau membatalkan hubungan antara suami dan istri. Fasakh

⁷⁵ Lihat Pasal 41 s/d Pasal 44 PP No.9 Tahun 1975

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁷⁶

Pengertain fasakh menurut Sayyid Sabiq adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-istri. Fasakh terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami-istri.⁷⁷ Fasakh karena tidak syara-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah apabila:

- a. Ketahuan kemudian bahwa suami istri itu ternyata punya hubungan nasab atau persusuan.
- b. Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih, tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan.
- c. Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.

Adapun fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad diantaranya:

- a. Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam.
- b. Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan hubungan suami istri.

⁷⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. ke-1, hlm. 73

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. ke-2, jilid 3, hlm. 627

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Suami terputus sumber nafkahnya dan si istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.⁷⁸

Putus perkawinan disebabkan fasakh, berbeda dengan talak, yang berlangsung hanyalah talak ba'in sughra, dalam arti suami tidak boleh kembali kepada istrinya dalam bentuk rujuk, namun dapat mengawini bekas istrinya itu tanpa muhallil. Beda lainnya dari talak adalah bahwa fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami dalam arti dapat dilakukan berulang kali tanpa memerlukan muhallil. Pada dasarnya fasakh itu dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau dari istri. Namun ada pula yang fasakh itu terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan hakim seperti antara istri ketahuan senasab atau sepersusuan.⁷⁹

Mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan (fasakh), beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh, yaitu sebagai berikut:

- a. Karena ada balak (penyalit belang kulit)
- b. Karena gila.
- c. Karena penyakit kista.
- d. Karena ada penyakit menular.
- e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2010), Cetak ke-3, hlm. 134

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Karena ‘unnah, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Disamping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan wali oleh laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: bak dengan merdeka, orang pezina dengan orang yang terpelihara dan sebagainya.
- b. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberika nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat, ataupun maskawinnya belum dibayarkannya sebelum campur.⁸⁰

Dalam pelaksanaan fasakh, apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara’, maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung atau saudara sesusuan.⁸¹ Tetapi fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan ialah yang disebabkan oleh hal-hal yang kurang jelas, seperti fasakh yang terjadi karena istri musyrik (bukan ahli kitab) menolak masuk Islam atau Agama Ahli Kitab, padahal suaminya telah masuk Islam, untuk meyakinkan apakah istri benar-benar menolak atau tidak diperlukan keputusan pengadilan. Misalnya lagi perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui

⁸⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit*, hlm. 198-201

⁸¹ *Ibid*, hlm. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal ini, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.

Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁸²

- a. Suami sakit gila
- b. Suami menderita sakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penyakit lepra.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impotent atau terpotong kemaluannya.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.
- e. Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab, keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
- f. Suami mafqud, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh tidak pula dilarang. Namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.

⁸² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam fikih Islam dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-Jaziry ada menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun-rukun. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama-sama tidak sah.⁸³

Dalam terminology undang-undang perkawinan nikah al-fasid dan nikah al-batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.⁸⁴

2. Pembatalan Perkawinan Perspektif Perundang-Undangan

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada.

⁸³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Op.cit*, hlm. 98

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No legal force or declared void*). Dan sesuatu yang dinyatakan *No legal force*, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada.⁸⁵

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan secara jelas, begitu juga PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Adapun pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau undang-undang.⁸⁶

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), Cet.ke-1, hlm. 71

⁸⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) , hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁸⁷ Didalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder krucht* (tidak ada kekuatan) *zoonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan absolut *nietig* adalah pembatalan mutlak.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁸⁸

Selain itu, pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut agama Islam maupun hukum Negara Indonesia.⁸⁹

⁸⁷ Lihat Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974

⁸⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Op.cit*, hlm. 106-107

⁸⁹ Lihat Pasal 70, Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:⁹⁰

- a. Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- d. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam , perkawinan dapat dibatalkan apabila:⁹¹

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

⁹⁰ Lihat Pasal 26 dan 27, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

⁹¹ Lihat Pasal 71, Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- b. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:⁹²

- a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
- b. Suami atau istri itu;
- c. Pejabat yang berwenang;
- d. Pejabat yang ditunjuk;
- e. Jaksa;
- f. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan;
- g. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap kelangsungan perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:⁹³

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019), Cet. ke-11, hlm. 36

⁹³ Lihat Pasal 73, Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

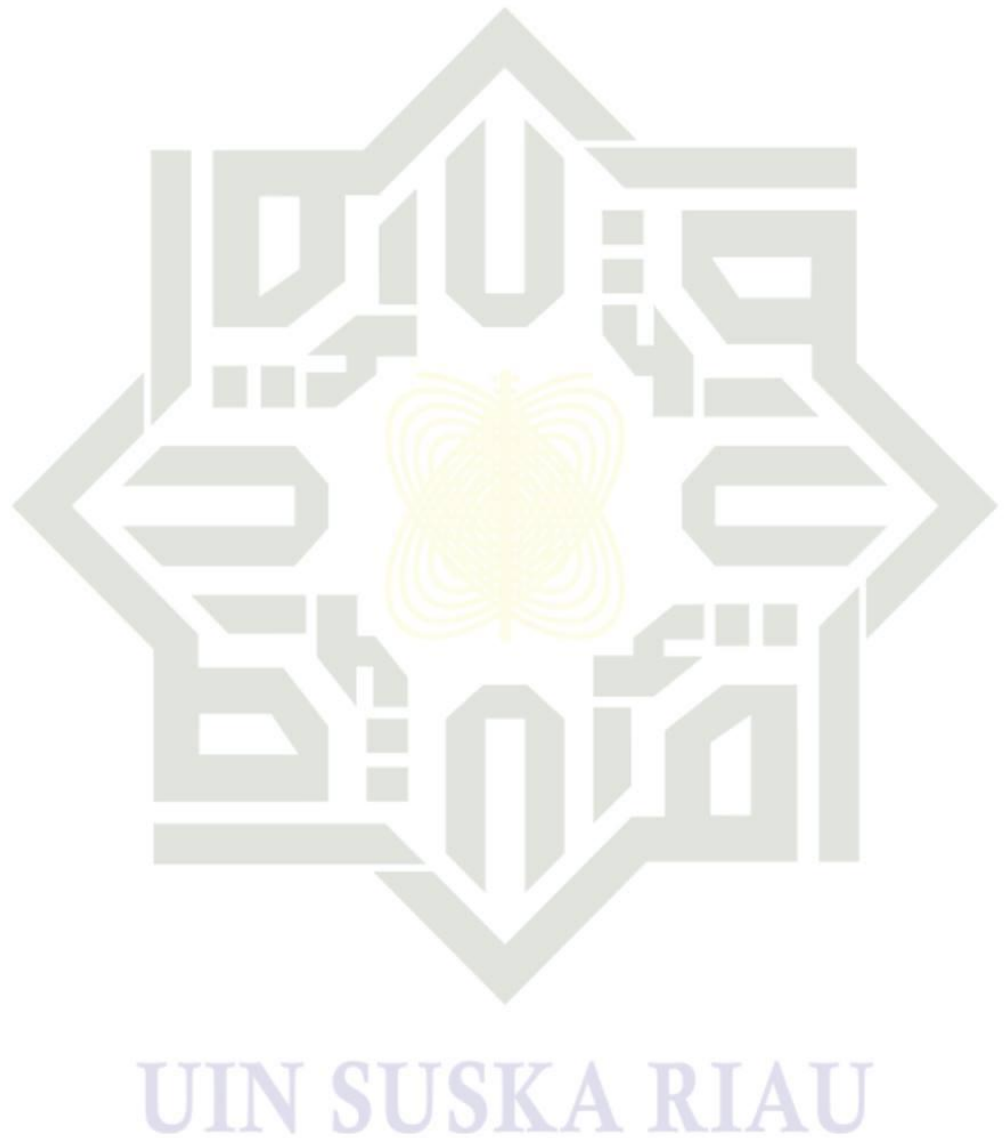
c. Akibat Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dapat kita temui dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 yang bunyinya:⁹⁴

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan lain yang lebih dulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁹⁴Lihat Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 76 KHI disebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan suatu hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.⁹⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁵ Lihat Pasal 76, Kompilasi Hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun isi dari putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A No. 1100/Pdt.G/2017/PA/Pbr. Mengenai pembatalan perkawinan antara Termohon 1 dan Termohon II, Hakim Memberikan Putusan Pada tanggal 26 September 2017: Mengabulkan permohonan pemohon; Menyatakan batal perkawinan/pernikahan antara termohon I dengan termohon II dan Menetapkan batal perkawinan/ pernikahan antara termohon I dan termohon II.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A dalam perkara No1100/Pdt.G/2017/PA/Pbr. Secara Yuridis, bahwa poligami tanpa izin Pengadilan Agama dapat dibatalkan, sesuai dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Psal 71 (a).
3. Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A No. 1835/Pdt.G/2018/PA. Pbr. Mengenai Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, sesuai dengan tujuan hukum Islam. karena Hukum Islam ada untuk menjaga eksistensi kemaslahatan Ummat Islam dalam beragama dan bernegara.

B. Saran

1. Bagi yang bersangkutan Termohon dan laki-laki yang hendak menikah atau poligami agar memperhatikan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat yang ditetapkan Pengadilan Agama untuk yang poligami.
2. Teruntuk pihak KUA agar lebih memperhatikan lagi dokumen maupun identitas pihak yang akan menikah agar tidak terjadi lagi penipuan dalam identitas.
3. Kepada para penuntut ilmu agar semakin mendalami ilmu agama, sebab ilmu terus berkembang dan diharapkan bisa hadir ditengah-tengah masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. ke-8. Jakarta: Prenamedia Group
- Abdul Mujieb, M, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. ke- 1
- Abdul Rahman Ghazali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Abdullah Tri Wahyudi. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2016. “Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi”, *Yudisia*, Vol.7
- _____. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acaa di Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Amir Syarifuddin. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*,. Cet. ke-3. Jakarta: Prenada Media Kencana
- _____. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta
- As'ari Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Bambang Sugiono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Buahan Bangin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Da'Amabrahtha Proayono dan Surini Ahlan Sjahrif. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana
- H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. ke-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Ibnu Kasir. 1992. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Cet. ke-1 juz 2. Beirut: Maktabah an-Nur al-'Ilmiyah
- Immanuel Christophel liwe. *kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan*, Lex Crimen Vol.III No.1
- Juhaya S. Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas
- K. Wantjik Saleh. 2004. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kamal Mukhtar. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Kamil Muhammad Uwaidah. 1998. *Fiqih Wanita*, Penterjemah M. Abdul Ghofar E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Jakarta
- Kementerian Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Huda: Depok
- Khoiruddin Nasution. 2004. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*. Cet. ke-1. Medan: CV. Zahir Trading
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana
- Mohammad Daud Ali. 2017. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Ke-22. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada
- Mohammad Nashiruddin Al-Bani. 2013. *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Penterjemah: Rahmatullah, Fudhail Rahman, Masrur Huda. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Azam
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. ke-5. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ramat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rahmat Ka'bah 2007. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", *Al-Mawardi*, Edisi XVII

Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa

Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. Cet. ke-2, jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang

Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press

Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Slamet Abidin dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia

Soemijati. 1996. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet 2. Yogyakarta: Liberti

Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Reneka Cipta 1991 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI 1999

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 23

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN.**

Ditulis oleh saudara :

Nama : ANGGITA KURNIA
NIM : 11621200521
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : SENIN, 18 NOVEMBER 2019
Narasumber : Dr. H. MOHD. YUNUS, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 02 Desember 2019
Narasumber

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
NIP. 19591231 1987 1 037

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10380/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 30 Desember 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANGGITA KURNIA
NIM : 11621200521
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.
1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang pembatalan perkawinan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an. Rektor
Dekan

Dr. H. Hajar., M.Ag.
19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/29262
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 041/PP.00.9/10380/2019 Tanggal 30 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ANGGITA KURNIA**
2. NIM / KTP : **11621200521**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO. 1100/PDT.G/2017/PA.PBR TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**
7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

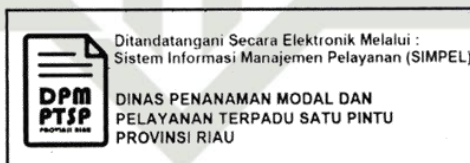
tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2019



Tembusan :
Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1.A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : umum@pa-pekanbaru.go.id

Website: www.pa-pekanbaru.go.id

Nomor W4-A1/ 905 /PB.00/2/2020

10 Februari 2020

izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

PEKANBARU

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/10380/2019, tanggal 30 Desember 2019, yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Riau dengan objek penelitian kantor Pengadilan Agama Pekanbaru perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Anggita Kurnia
NPM : 11621200521
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*" dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara dan terima kasih.

Wassalam
Plh. Panitera,

Fakhriadi., S.H., M.H

Nip.196610251994031004

Tembusan

1. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anggita Kurnia

NIM : 11621200521

Program Studi: HUKUM KELUARGA

Judul : *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/PDT.G/2017PA.PBR Tentang Pembatalan Perkawinan*

Pembimbing : Dr. H. Johari, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juni 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIR. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Anggita Kurnia lahir di kota Pekanbaru pada tanggal 17 Desember tahun 1998, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Kurniadi dan Nursima. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 022 Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang selama 6 tahun, yaitu di tingkatan Diniyyah Menengah Pertama (DMP) pada tahun 2010-2013, dan di tingkat MA. KMI Perguruan Diniyyah Puteri pada tahun 2013-2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau pada tahun 2016 dengan mengambil jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (hukum keluarga) di Fakultas syariah dan Hukum.

Pada masa perkuliahan penulis pernah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Pengadilan Agama Klas 1a Pekanbaru dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau (KKN) di desa Muara Lembu Kecamatan singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tanggal 18 November 2019 penulis melaksanakan ujian proposal, kemudian penulis melanjutkan penelitian kepustakaan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan" dibawah bimbingan bapak Dr. H. Johari, M.Ag, kemudian disetujui pada 02 Mei 2020 oleh pembimbing skripsi untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi (sidang munaqasah) pada hari Senin tgl 19 Mei 2020 dan alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan predikat Cum Laude.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.